

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persentase pertumbuhan ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi, yang mana pada tahun 2014 persentase pertumbuhan ekuitas dana sebesar 0,12% dan bernilai positif. Pada tahun 2015 persentase pertumbuhan ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang sebesar -0,99% dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekuitas dananya dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan dan kurang baik. Dan di tahun 2016, persentase pertumbuhan ekuitas dana sebesar 0,06% dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekuitas dana dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan dan tergolong baik.
2. Rasio utang terhadap ekuitas dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014, rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,14%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 0,14% ekuitas diperlukan untuk mendanai utang pemerintah daerah Kota Kupang, di tahun 2015 rasio utang terhadap ekuitas adalah sebesar 0,12%, yang artinya 0,12% ekuitas diperlukan untuk mendanai utang

pemerintah daerah Kota Kupang dan pada tahun 2016 rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,44%, yang artinya 0,44% ekuitas yang diperlukan untuk mendanai utang pemerintah daerah Kota Kupang. Jika dilihat data diatas dari prespektif manajemen keuangan daerah, rasio utang terhadap ekuitas dari tahun 2014-2016 tersebut masih dalam posisi yang sangat aman atau beresiko rendah. Selain itu hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Kupang tidak mengalami *over-leveraged* atau sangat terbebani utang serta utang pemerintah daerah Kota Kupang masi sangat kecil jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki.

3. Penurunan dan peningkatan jumlah ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang tahun anggaran 2014-2016 tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah Kota Kupang. Hal ini dikarenakan kekayaan bersih atau ekuitas dana yang ada pada pemerintah daerah Kota Kupang kenyataan memang besar namun tidak dapat digunakan untuk mendanai pembangunan daerah Kota Kupang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Kota Kupang diharapkan menjaga keseimbangan antara aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah Kota Kupang pada periode yang akan datang untuk akselerasi pembangunan daerah.

2. Pemerintah daerah Kota Kupang diharapkan mampu dengan baik mengelola dan memanfaatkan sepenuhnya kekayaan bersih atau ekuitas dana pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andy Offset. Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Jakarta*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tentang Penerapan Standar*.
- Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Jakarta. *Pemerintah Republik Indonesia*. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Mole, Dance. 2015. *Penerapan Akuntansi Ekuitas Dana Pada Pemerintah Kota Bitung: Universitas Sam Ratulangi Manado*. *Jurnal EMBA*. Vol. 3, No 2 Juni 2015. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8912/8453>. Diakses pada 22 maret 2018.
- Assidiqi, Bahrin. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*: Universitas Negeri Yogyakarta. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8912/8453> . Diakses pada 22 maret 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*, Penerbit Fokusmedia.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tentang keuangan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

- Riyanti,Umi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan*: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8912/8453> . Diakses pada 22 maret 2018.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah: Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta.
- Fauziah.2010. *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Lima Puluh Kota*: Universitas AndalasPadang.<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/8912/8453> . Diakses pada 22 maret 2018.
- Tobi Regina Maria.2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur*: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 8, Agustus 2016. Diakses pada 22 maret 2018.